

Pemprov DKI akan Beli Properti Warga

Warga Jl Fatmawati khawatir harga properti jatuh apabila Pemprov DKI tetap membangun MRT.

SELAMAT SARAGIH

PEMPROV DKI Jakarta akan membeli properti milik warga di Jl Fatmawati, Jakarta Selatan, khususnya bagi warga yang keberatan terhadap pembangunan *mass rapid transit* (MRT).

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena Pemprov DKI tidak ingin terkendala dalam membangun MRT yang sudah 20 tahun tertunda.

"Ya penolakan itu karena mereka mengasumsikan kawasannya nanti akan jadi kumuh seperti di Stasiun

Kereta Api Juanda dan segala macam," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.

Warga di Jl Fatmawati, lanjut Ahok juga khawatir nilai properti mereka akan turun karena keberadaan stasiun MRT. "Mereka bilang propertinya turun. Padahal di seluruh dunia, kawasan yang dilalui MRT pasti mahal nilai propertinya," imbuhnya.

Menurut dia, penolakan tersebut dilakukan karena warga Fatmawati belum mengetahui kondisi properti yang dilewati MRT di negara-negara yang sudah mengoperasikan transportasi massal berbasis rel ini.

Pemprov DKI akan membuka dialog dan menawarkan untuk membeli properti warga agar pembangunan MRT bisa selesai sesuai target pada 2017.

Dia menambahkan dalam pembangunan MRT ini, Pemprov DKI memakai dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Kontrak pinjaman

jangka panjang untuk proyek pembangunan MRT itu dianggap Pemprov DKI menguntungkan.

"Kita untung. Cicilan selama 40 tahun. Apalagi pusat menanggung 49% dari sebelumnya 42%," ungkap Ahok.

Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah perusahaan lokal bisa berkontribusi besar dalam proyek tersebut. Meskipun produk MRT ini berasal dari Jepang, proyek pengerjaannya akan dilakukan perusahaan lokal termasuk BUMN. "Supaya lebih murah, pihak Jepang mengajak BUMN untuk bersama-sama membuat desain," tambahnya.

Untuk menekan harga, Pemprov DKI menggandeng konsorsium PT Wijaya Karya (Wika)-Obayashi untuk menggarap megaprojek tersebut. Dengan proyek yang murah akan berdampak pada harga tiket yang terjangkau.

"Nanti kita akan hitung harga tiketnya. Petunjuk Pak

Gubernur sederhana, maksimal pengeluaran untuk transportasi hanya boleh 10%-15% dari UMP setiap bulan, dan tak boleh lebih besar."

Cara untuk menekan harga tiket adalah dengan memaksimalkan pembangunan kawasan di dekat stasiun MRT atau *transit oriented development* (TOD).

Proyek monorel

Sementara itu, di Madiun, Jawa Timur, sejumlah BUMN telah membentuk konsorsium untuk penggarapan tiga megaprojek perkeretaapian Indonesia senilai Rp12,5 triliun.

Rencana megaprojek itu telah disepakati melalui penandatanganan kesepakatan antara direktur BUMN yang terlibat dalam konsorsium dan disaksikan Menteri BUMN di PT INKA, Madiun, kemarin.

Hadir sejumlah direktur BUMN dari PT INKA, PT LEN, Jasa Marga, Telkom Indonesia, Adhi Karya, Pelindo, Angkasa

Pura, dan Bank Mandiri.

Ketiga megaprojek yang disepakati adalah Monorel Jakarta Link Transportations, Automated People Mover Systems, dan Automated Container Transportation.

Ketiga proyek ini sebagai solusi transportasi di Jakarta dan Surabaya. "Proyek ini merupakan proyek yang termurah. Dan insya Allah bermanfaat besar bagi masyarakat di Jakarta sekitarnya dan Surabaya sekitarnya," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan usai menghadiri peresmian kereta monorel buatan PT INKA.

Ia menegaskan untuk pembangunan monorel, dijamin tidak akan menggusur tanah warga. "Proyek ini dijamin aman, karena tidak ada pengusuran tanah warga," ujar Dahlan seraya menambahkan proyek baru akan dimulai pada 2014. (YP/ST/J-4)

selamat
@mediaindonesia.com